

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Fisik Wilayah

Desa Sibuea merupakan salah satu desa di Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dengan luas wilayah 150 Ha dan letak geografis $2^{\circ} 14' - 2^{\circ} 22'$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 12' - 98^{\circ} 06'$ Bujur Timur dengan keadaan iklim $25^{\circ} C$. Sesuai dengan kondisi daerah desa Sibuea yang sejuk, desa sibuea memiliki luas tanah sawah 30 Ha, dan untuk area tanah kering dengan luas 70 Ha, dan area bangunan pekarangan dengan luas 50 Ha. Desa Sibuea juga terdiri dari 7 dusun yakni Dusun Parluasan Lorong 1, Dusun Jalan Harapan s/d Diponegoro, Dusun Sosor Pangan Lobu, Dusun Sosor Ginjang s/d Sosor Pulo, Dusun Lumban Sabatur, Dusun Parluasan Lorong 2, Dusun Parluasan Lorong 3.

Adapun batas – batas wilayah yang ada di desa Sibuea Kecamatan Laguboti antara lain sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simatibung
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pasar Laguboti
3. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Haunatas
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasar Laguboti

2. Kondisi Non Fisik Wilayah

2.1 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan di suatu daerah, jika penduduk suatu daerah sedikit maka sumber daya alam yang ada tidak akan

berfungsi sesuai dengan keadaanya. Karena itu penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. .

Keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah tidak akan terjadi jika hanya didukung oleh jumlah penduduk yang besar, oleh sebab itu pembangunan akan berhasil jika jumlah penduduk yang besar di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Menurut data yang diperoleh tahun 2015, jumlah penduduk Desa Sibuea mencapai 1050 jiwa. Secara ringkas berikut akan disajikan penyebaran jumlah penduduk desa Sibuea kecamatan Laguboti pada setiap desa pada table 1.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Sibuea Kecamatan Laguboti

| Dusun | Lk | Pr | Kepala Keluarga | Jumlah |
|-----------|-----|-----|-----------------|--------|
| Dusun I | 98 | 111 | 42 | 209 |
| Dusun II | 97 | 112 | 61 | 209 |
| Dusun III | 54 | 57 | 42 | 111 |
| Dusun IV | 78 | 75 | 31 | 153 |
| Dusun V | 42 | 41 | 16 | 83 |
| Dusun VI | 63 | 61 | 25 | 124 |
| Dusun VII | 79 | 82 | 33 | 161 |
| Jumlah | 511 | 539 | 250 | 1050 |

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Sibuea 2015

Table 1 menunjukkan bahwa kemungkinan Dusun I dan Dusun II merupakan yang memiliki jumlah penduduk yang terbesar jika dibandingkan dengan yang lain yaitu mencapai 209 tetapi Dusun 2 memiliki jumlah Kepala Keluarga lebih banyak yaitu 61 Kepala Keluarga di banding Dusun 1 yang memiliki 42 Kepala Keluarga, meskipun Dusun I dan Dusunj II memiliki jumlah penduduk yang

sama. Sedangkan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Dusun V yakni 83 jiwa dengan jumlah 16 Kepala Keluarga.

2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Secara umum kehidupan beragama di Desa Sibuea ini cukup baik, saling menghargai, dan menghormati antar pemeluk agama ditandai dengan tidak adanya konflik dan pertentangan. Berikut ini akan diuraikan jumlah penduduk berdasarkan agama.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di Desa Sibuea Kecamatan Laguboti

| Agama | Laki – Laki | Perempuan | Jumlah |
|-------------------|-------------|-----------|--------|
| Islam | 14 | 29 | 43 |
| Kristen Protestan | 473 | 426 | 899 |
| Kristen Katholik | 22 | 79 | 101 |
| Budha | 2 | 5 | 7 |
| Hindu | - | - | - |
| Jumlah | 511 | 539 | 1050 |

Sumber: Kantor Desa Sibuea Kecamatan Laguboti 2015

Table 2 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Sibuea beragama Kristen Protestan yakni mencapai 899 jiwa dan diikuti dengan 101 jiwa agama Kristen Katholik, lalu 43 jiwa yang beragama Islam dan 7 jiwa yang beragama Budha. Walaupun demikian, di dalam kehidupan masyarakat sehari – hari di desa Sibuea mengutamakan saling menghargai dan kerukunan antar umat beragama. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan bersama dalam kegiatan bergotong royong, membersihkan parit – parit, menjaga kebersihan lingkungan dan saling mengundang ketika mengadakan pesta.

2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan memegang peran penting untuk menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas, karena dalam proses pendidikan akan meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia.

Latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi kualitas penduduk disuatu daerah dan biasanya juga akan mempengaruhi cara berfikir dalam menghadapi masalah. Untuk mengetahui jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di desa Sibuea dapat dilihat dari table 3 berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Desa Sibuea Kecamatan Laguboti

| Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|-------------------------|--------|
| PAUD/TK | 70 |
| SD | 169 |
| SLTP | 172 |
| SLTA | 176 |
| Diploma (D-1, D-2, D-3) | 147 |
| Sarjana (S-1, S-2, S-3) | 210 |
| Jumlah | 944 |

Sumber: Kantor Desa Sibuea Kecamatan Laguboti 2015

Tabel 3 menunjukkan bahwa 70 penduduk Desa Sibuea berpendidikan PAUD/TK, 169 berpendidikan Sekolah Dasar (SD), 172 berpendidikan SLTP, 176 berpendidikan SLTA, 147 berpendidikan Diploma/D-1/ D-2/ D-3, dan 210 berpendidikan Sarjana/ S-1/ S-2/ S-3. Begitu pentingnya pendidikan kerana dengan keberhasilan pendidikan akan menunjang dan dapat diarahkan dengan mewujudkan pembangunan nasional yang akan dilaksanakan.

3. Deskripsi data hasil Penelitian

Hasil penelitian dalam hal ini adalah menganalisis data secara keseluruhan yang bertujuan menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang dimaksud sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Sehingga dalam uraian dibawah ini hanya menyajikan data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk tabel frekuensi dan disertai dengan komentar. Berikut ini akan disajikan data serta analisis data yang dimaksud.

Tabel 4
Tanggapan Responden Tentang Mengetahui Perencanaan Pembangunan di Desa Sibuea

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 11 | 22 % |
| b. Kadang-kadang | 37 | 74 % |
| c. Tidak Sama Sekali | 2 | 4 % |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang pernah mengetahui perencanaan pembangunan di desa sibuea sebanyak 11 responden (22%), dan yang memilih kadang-kadang sekitar 37 responden (74%) dan tidak mengetahui perencanaan pembangunan di desa sibuea sebanyak 2 responden (4%). Ini membuktikan bahwa kurang pedulinya masyarakat terhadap rencana pembangunan di desa sibuea.

Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa masyarakat di desa sibuea kecamatan laguboti belum sepenuhnya mengetahui perencanaan pembangunan yang di lakukan di desa tersebut. Terbukti dari responden yang memilih Ya hanya 11 responden (22%) masyarakat yang memilih Ya, merasa memang mengetahui

perencanaan pembangunan yang ada di desa, rasa ingin tahu dan kepedulian masyarakat ini sangat tinggi. Dan responden lebih banyak mengatakan kadang-kadang sekitar 37 responden (74%) pernah mengetahui apa saja perencanaan pembangunan yang di buat oleh pemerintah di desa menurut masyarakat pemerintah masih kurang memberikan informasi kepada masyarakat, sementara yang memilih Tidak sama sekali sekitar 8 responden (16%) masyarakat mengaku bahwa mereka sama sekali tidak tahu menahu mengenai pembangunan di desa sibuea kecamatan laguboti.

Tabel 5
Tanggapan Responden Tentang Pernah Menghadiri Rapat Yang
Dibentuk Oleh Pemerintah desa Dalam Program Perencanaan
Pembangunan Di Desa Sibuea

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 11 | 22% |
| b. Kadang-kadang | 31 | 62 % |
| c. Tidak Sama Sekali | 8 | 16 % |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa sibuea yang pernah menghadiri rapat yang dibentuk oleh pemerintah desa dalam program perencanaan pembangunan di desa sibuea sebanyak 11 responden (22%) menyatakan Ya, sebanyak 31 responden (62%) yang menyatakan Kadang-kadang, serta sebanyak 8 responden (16%) menyatakan Tidak.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat di Desa Sibuea menghadiri rapat yang dibentuk oleh pemerintah desa dalam program perencanaan pembangunan di desa sibuea, Sebanyak 11 responden (22%)

menyatakan Ya atau antusias ikut dalam setiap rapat yang dilalukan oleh kepala desa, bahwa masyarakat yang memilih ya adalah masyarakat yang memang benar-benar peduli akan pembangunan di desa.

Ada 31 responden (62%) yang menyatakan Kadang-kadang mau ikut dalam rapat yang di adakan oleh kepala desa, hal ini membuktikan bahwa masyarakat tidak serius mengenai pembangunan di desanya. Serta sebanyak 8 responden (16%) menyatakan Tidak pernah sama sekali menghadiri rapat yang dibentuk oleh pemerintah desa dalam program perencanaan pembangunan di desa sibuea, masyarakat yang tidak pernah mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah masyarakat yang sama sekali tidak ingin tahu atau tidak peduli dengan perkembangan pembangunan di desa. Ini membuktikan bahwa antusias masyarakat masih kurang dalam mengetahui program perencanaan pembangunan di desa sibuea.

Tabel 6
Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Desa Selalu Melakukan Komunikasi Langsung Dengan Masyarakat

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 7 | 14 % |
| b. Kadang-kadang | 28 | 56 % |
| c. Tidak Sama Sekali | 15 | 30% |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa selalu melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat sebanyak 7 responden (14 %) menyatakan Ya, sebanyak 28 responden (56%) menyatakan kadang-kadang, dan 15 responden (30%) memilih tidak sama sekali.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa selalu tidak melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan menjawab Ya yakni 7 Kepala Keluarga (14%) masyarakat mengaku bahwa pemerintah desa sangat jarang melakukan komunikasi dengan masyarakatnya seharusnya pemerintah desa melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus sebagai proses sosialisasi dan untuk pencapaian stabilitas sosial, tertib sosial yang diagungkan oleh suatu masyarakat. Sekitar 28 responden atau (56%) masyarakat mengaku bahwa pemerintah desa hanya kadang-kadang saja melakukan komunikasi dengan masyarakatnya, menurut masyarakat melalui komunikasi dengan masyarakat menjadikan kesadaran masyarakat dipupuk, dibina dan diperluas dalam membangun desa. Dan ada sekitar 15 responden (30%) yang mengatakan Tidak sama sekali, bahwa pemerintah desa tidak pernah melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat, seharusnya pemerintah desa perlu sering-sering melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat agar masyarakat saling mendukung dalam membangun sistem atau pola komunikasi yang sesuai dengan kondisi desa, sebagai cara untuk menggugah kesadaran, pengetahuan, hak dan kewajiban masyarakat dalam membangun dan mengembangkan sistem komunikasi yang baik dan sehat secara bersama-sama di masyarakat.

Selain itu kepercayaan antar pemerintah desa dengan masyarakat harus tetap terjalin sehingga dalam masyarakat desa tersebut komunikasinya berjalan lancar, dan setiap aparatur pemerintah desa harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik karena apabila salah satu kebijakan yang

dibuat tidak berjalan maka akan mempengaruhi kelancaran komunikasi dalam desa tersebut.

Tabel 7
Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Desa Selalu Melihat Kebutuhan Masyarakat

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 8 | 16 % |
| b. Kadang-kadang | 19 | 38 % |
| c. Tidak Sama Sekali | 23 | 46 % |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa selalu melihat kebutuhan masyarakat desa. Sebanyak 8 responden (16%) menyatakan Ya, sebanyak 19 responden (38%) menyatakan Kadang-kadang dan sebanyak 23 responden (46%) menyatakan Tidak Sama Sekali.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebanyak 8 Kepala Keluarga (16%) menyatakan bahwa pemerintah desa selalu melihat kebutuhan masyarakatnya. Responden mengaku pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam melihat kebutuhan masyarakat di desa sibuea atau dengan kata lain pemerintah desa yang memiliki fungsi sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur kebutuhan masyarakat.

Ada sebanyak 19 Kepala Keluarga (38%) menyatakan Kadang-kadang bahwa pemerintah kadang-kadang dalam melihat kebutuhan masyarakat, masyarakat mengaku bahwa pemerintah desa kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat di desa sibuea kecamatan laguboti dan sebanyak 23 responden (46%) menyatakan Tidak Sama sekali bahwa pemerintah desa belum melihat kebutuhan masyarakat.

Responden menganggap bahwa pemerintah desa hanya mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rakyat. Masyarakat menganggap ketika pemerintah desa sudah duduk di kursi kekuasaan mereka menjadi lupa dengan janji yang mereka suarakan.

Tabel 8
Tanggapan Responden Tentang Usaha Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Untuk Memberdayakan Masyarakat

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 8 | 16 % |
| b. Kadang-kadang | 32 | 64 % |
| c. Tidak Sama Sekali | 10 | 20 % |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa 8 responden (16%) menyatakan Ya bahwa ada upaya yang dilakukan oleh kepala desa untuk memberdayakan masyarakat, 32 Kepala Keluarga (64%) menyatakan Kadang-kadang bahwa kepala desa masih kurang dalam melakukan usaha untuk memberdayakan masyarakat, 10 Kepala Keluarga (20%) menyatakan kepala desa tidak melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat desa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat sudah belum cukup berhasil, hal ini dapat dibuktikan dengan hanya 8 responden (16%) menyatakan bahwa pemerintah desa telah melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat, responden mengatakan bahwa kepala desa cukup aktif dalam memberdayakan masyarakat, sebaliknya ada 32 responden (64%) yang menyatakan kadang-kadang, bahwa pemerintah desa kadang-kadang melakukan usaha untuk memberdayakan masyarakat,

misalnya dengan melihat pengrajin ulos. Dan 10 responden (20%) menyatakan bahwa pemerintah desa tidak pernah sama sekali melakukan usaha untuk memberdayakan masyarakat desa Sibuea. Masyarakat mengatakan bahwa pemerintah desa tidak peduli dengan masyarakatnya.

Dengan terjadinya hal ini pemerintah desa belum bekerja dengan maksimal untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan pemerintahan desa yang kuat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Tabel 9
Tanggapan Responden Tentang Kepala desa Selalu memperhatikan Aspirasi Masyarakat desa Dalam Perencanaan pembangunan Desa

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 12 | 24 % |
| b. Kadang-kadang | 6 | 12 % |
| c. Tidak Sama Sekali | 32 | 68 % |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa kepala desa tidak memperhatikan aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa. Sebanyak 12 responden (24%) menyatakan Ya bahwa kepala desa selalu memperhatikan aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa sebanyak 6 responden (12%) menyatakan Kadang-kadang bahwa kepala desa kadang-kadang memperhatikan aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa dan sebanyak 32 responden (64%) menyatakan bahwa kepala desa tidak pernah memperhatikan aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa walaupun di berikan kebebasan berpendapat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sebanyak 12 responden (24%) menyatakan bahwa kepala desa selalu memperhatikan aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa, dengan adanya peran dari Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Dan 6 responden (12%) menyatakan pemerintah desa hanya kadang-kadang memperhatikan aspirasi masyarakat di desa, responden mengaku bahwa pemerintah desa tidak sepenuhnya peduli dengan aspirasi yang di berikan oleh masyarakat. Dan 32 (64%) menyatakan tidak sama sekali bahwa pemerintah desa tidak pernah memperhatikan aspirasi masyarakat desa, kepala desa kepala desa bersikap tidak memperhatikan prioritas masyarakat yang telah disepakati agar pembangunan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 10
Tanggapan Responden Tentang Diberikan Kebebasan Untuk Mengemukakan Aspirasi Atau Pikiran Mengenai Pembangunan Desa Yang Akan Dilaksanakan

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 50 | 100 % |
| b. Kadang-kadang | - | - |
| c. Tidak Sama Sekali | - | - |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua responden yaitu 50 responden (100%) diberikan kebebasan untuk mengemukakan aspirasi atau pikiran mengenai pembangunan desa yang akan di laksanakan. Masyarakat desa diberi kesempatan untuk melihat dan memahami pilihan-pilihan yang tersedia dan

kemudian diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri. Aspirasi atau pendapat yang diharapkan mulai dari pengambilan keputusan dalam penentuan sasaran dan tujuan pembangunan, pada tahap pelaksanaan, monitoring/pengawasan, evaluasi pembangunan serta dalam merasakan hasil pembangunan di dengar oleh pemerintah desa.

Responden mengatakan pemerintah desa memberikan kebebasan untuk memberikan aspirasi atau pendapat, kritikan atau saran dari masyarakat. Responden mengaku pemerintah desa menerima masukan yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini kemudian bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah desa sebelum melakukan pembangunan di desa.

Tabel 11
Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Desa Selalu Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 6 | 12 % |
| b. Kadang-kadang | 42 | 84 % |
| c. Tidak Sama Sekali | 2 | 4 % |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa sibuea tidak selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebanyak 6 responden (12%) menyatakan Ya, sebanyak 42 responden (84%) yang menyatakan Kadang-kadang, serta sebanyak 2 responden (4%) menyatakan Tidak Sama Sekali.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa tidak selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, hal ini dapat dibuktikan dengan

jumlah responden yang menjawab Ya hanya 6 responden saja (12%) responden mengatakan bahwa kepala desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sebaliknya yang menyatakan kadang-kadang yakni sebanyak 42 responden (84%) bahwa pemerintah desa tidak selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan di desa. Seharusnya pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang menjadi perhatian, jika tidak ada proses pengawalan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, maka aparat pemerintah desa juga akan bertindak secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi pedoman dalam pembangunan desa. Dan 2 responden (4%) yang menyatakan tidak sama sekali, bahwa pemerintah desa tidak pernah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Akibatnya, keterbuakaan informasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa tersendat dan bisa jadi desa akan mengalami perkembangan yang sangat lambat.

Tabel 12

Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Desa Telah Memanfaatkan Sumberdaya Pembangunan Untuk Dapat Meningkatkan Produksi Dan Produktivitas Dalam Mencapai Sasaran Pembangunan Masyarakat

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 12 | 24 % |
| b. Kadang-kadang | 17 | 34 % |
| c. Tidak Sama Sekali | 21 | 42 % |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan pemerintah desa tidak memanfaatkan sumberdaya pembangunan untuk dapat meningkatkan produksi dan produktivitas

dalam mencapai sasaran pembangunan masyarakat sebanyak 12 responden (24%) menyatakan Ya bahwa pemerintah desa telah memanfaatkan sumberdaya pembangunan untuk dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mencapai sasaran pembangunan masyarakat, sebanyak 17 responden (34%) menyatakan Kadang-kadang bahwa pemerintah desa telah memanfaatkan sumberdaya pembangunan untuk dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mencapai sasaran pembangunan masyarakat dan sebanyak 21 responden (42%) menyatakan bahwa pemerintah desa tidak pernah memanfaatkan sumberdaya pembangunan untuk dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mencapai sasaran pembangunan masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa tidak memanfaatkan sumberdaya pembangunan untuk dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mencapai sasaran pembangunan masyarakat terbukti dengan responden yang menjawab Ya hanya sebanyak 12 responden (24%) seharusnya produksi dan produktivitas akan meningkat bila pengelolaan sumber daya pembangunan yang ada dimanfaatkan dengan baik, dan 17 responden (34%) yang menyatakan kadang-kadang bahwa pemerintah desa kadang-kadang memanfaatkan sumberdaya pembangunan untuk dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mencapai sasaran pembangunan masyarakat sehingga perencanaan yang dilakukan hanya akan menghasilkan perencanaan yang cenderung jalan ditempat dan tidak menghasilkan apa-apa. Dan 21 responden (42%) menyatakan tidak sama sekali bahwa pemerintah desa pemerintah desa tidak memanfaatkan sumberdaya pembangunan untuk dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam

mencapai sasaran pembangunan masyarakat. Seharusnya pemerintah desa memanfaatkan sumberdaya yang baik sehingga dapat mengembangkan desa dengan mampu melihat peluang dan masalah yang ada dan tentunya juga mempertimbangkan potensi sumberdaya pembangunan yang dipunya sehingga proses perencanaan dalam pembangunan desa dapat tersistematis dan berkelanjutan.

Tabel 13
Tanggapan Responden Tentang Perencanaan Pembangunan Di desa Ini
Juga Merupakan Tanggung Jawab Masyarakat

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 50 | 100 % |
| b. Kadang-kadang | - | - |
| c. Tidak Sama Sekali | - | - |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 50 responden (100%) menyatakan Ya, perencanaan pembangunan di desa juga merupakan tanggung jawab masyarakat, tidak ada yang menyatakan kadang-kadang bahwa perencanaan pembangunan di desa juga kadang-kadang merupakan tanggung jawab masyarakat dan yang menyatakan tidak sama sekali bahwa perencanaan pembangunan di desa juga merupakan tanggung jawab masyarakat juga tidak ada.

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa sibuea menyadari perencanaan pembangunan di desa juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Kegiatan pembangunan yang giat-giatnya dilaksanakan saat ini bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga tanggung jawab semua elemen masyarakat. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam

mengolah semua potensi yang dimiliki oleh desa agar tercipta pembangunan yang maksimal. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan perlu adanya partisipasi aktif dari seluruh masyarakat.

Tabel 14
Tanggapan Responden Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Sangat Diperlukan

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 50 | 100 % |
| b. Kadang-kadang | - | - |
| c. Tidak Sama Sekali | - | - |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 50 responden (100%) menyatakan Ya, bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukan, tidak ada responden yang menyatakan kadang-kadang bahwa bahwa kadang-kadang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukan dan yang menyatakan tidak sama sekali bahwa bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukan juga tidak ada.

Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh responden setuju dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukan karena keterlibatan masyarakat merupakan suatu hal yang menunjang pembangunan di desa, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak begitu saja tumbuh dengan sendirinya, melainkan pemerintah harus aktif untuk terus mendorong dan meningkatkan motivasi dari setiap masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 15
Tanggapan Responden Tentang Mengetahui Program-Program
Pembangunan Yang Dilakukan Di Desa

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 12 | 24 % |
| b. Kadang-kadang | 15 | 30 % |
| c. Tidak Sama Sekali | 23 | 46% |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan masyarakat mengetahui program-program pembangunan yang dilakukan di desa sebanyak 12 responden (24%) menyatakan Ya bahwa menunjukkan masyarakat mengetahui program-program pembangunan yang dilakukan di desa, sebanyak 15 (30%) menyatakan Kadang-kadang bahwa masyarakat kadang-kadang mengetahui program-program pembangunan yang dilakukan di desa dan sebanyak 23 responden (46%) menyatakan tidak sama sekali bahwa masyarakat sama sekali tidak mengetahui program-program pembangunan yang dilakukan di desa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak cukup mengetahui program-program pembangunan yang dilakukan di desa dilihat dari banyaknya responden yang memilih menjawab Ya hanya sekitar 12 responden (24%). Seharusnya masyarakat mengetahui program-program pembangunan di desa dengan diawali dari musyawarah di setiap dusun yang dilanjutkan ke musyawarah desa yang dihadiri oleh semua masyarakat dalam rangka menjelaskan program-program pembangunan desa. Sekitar 15 responden (30%) memilih kadang-kadang bahwa masyarakat mengetahui program-program pembangunan yang dilakukan di desa. Seharusnya bila pemerintah desa menjelaskan program-program pembangunan

tentu masyarakat mengetahui program-program pembangunan yang dilakukan di desa karena dari penjelasan yang disampaikan pemerintah desa tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Dan 23 (46%) menyatakan tidak sama sekali bahwa masyarakat sama sekali tidak mengetahui program-program pembangunan yang dilakukan di desa, seharusnya sebagai wakil dari masyarakat Lembaga Desa juga berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam menggerakkan program Pembangunan. Pemerintah Desa beserta Lembaga Desa merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun Pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera atau lebih prioritas.

Tabel 16
Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Dalam Memahami Proses
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 12 | 24 % |
| b. Kadang-kadang | 16 | 32 % |
| c. Tidak Sama Sekali | 22 | 44 % |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan kemampuan dalam memahami proses penyusunan perencanaan pembangunan desa sebanyak 12 responden (24%) menyatakan Ya bahwa menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memahami proses penyusunan perencanaan pembangunan desa sebanyak 16 responden (32%) menyatakan Kadang-kadang bahwa kadang-kadang masyarakat memahami proses

penyusunan perencanaan pembangunan desa dan sebanyak 22 responden (44%) menyatakan bahwa masyarakat tidak memahami proses penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum dapat memahami proses penyusunan perencanaan pembangunan desa dilihat dari banyaknya responden yang memilih menjawab Ya hanya 12 responden (24%) bahwa masyarakat dapat memahami proses penyusunan perencanaan pembangunan desa, responden mengatakan bahwa penjelasan dari pemerintah cukup dipahami oleh responden. dan yang menyatakan kadang-kadang adalah sekitar 16 (32%) bahwa kadang-kadang masyarakat dapat memahami proses penyusunan perencanaan pembangunan desa, responden mengaku banyak penjelasan yang kurang dimengerti oleh responden. Dan yang memilih tidak sama sekali sekitar 22 Kepala Keluarga (44%) mengingat masih banyak masyarakat desa sibuea yang berpendidikan rendah. Dengan terjadinya hal ini diharapkan kepada kepala desa harus bekerja secara maksimal terutama dalam menjelaskan proses penyusunan perencanaan pembangunan kepada masyarakat.

Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Perencanaan dan penganggaran desa terutama dari segi prosesnya menjadi kewenangan desa yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjarangan

aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan.

Tabel 17
Tanggapan Responden Tentang Paham Dengan Konsep Perencanaan Pembangunan Desa

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 12 | 24 % |
| b. Kadang-kadang | 16 | 32 % |
| c. Tidak Sama Sekali | 22 | 44% |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan masyarakat paham dengan konsep perencanaan pembangunan desa sebanyak 12 responden (24%) menyatakan Ya bahwa masyarakat paham dengan konsep perencanaan pembangunan desa, sebanyak 16 responden (32%) menyatakan Kadang-kadang masyarakat paham dengan konsep perencanaan pembangunan desa dan sebanyak 22 responden (44%) menyatakan masyarakat tidak paham dengan konsep perencanaan pembangunan desa

Jadi dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang paham dengan konsep perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari hanya 12 responden (24%) yang menyatakan bahwa masyarakat paham dengan konsep perencanaan pembangunan desa , sementara 16 responden (32%) mengatakan bahwa masyarakat kadang-kadang paham dengan konsep perencanaan pembangunan desa, responden mengatakan bahwa tidak sepenuhnya penjelasan dari pemerintah desa dapat dipahami responden. Dan sebanyak 22 responden (44%) menyatakan

masyarakat tidak paham dengan konsep perencanaan pembangunan desa hal ini dilihat dari banyaknya responden lebih memilih tidak sama sekali yang artinya masyarakat sama sekali belum paham dengan konsep perencanaan pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah desa.

Sehubungan dengan peran pemerintah desa bahwa dalam proses konsep perencanaan pembangunan perlu mengikut sertakan seluruh komponen masyarakat dalam bentuk forum antar pemangku kepentingan atau forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang daerah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam konsep Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Prinsip yang digunakan untuk proses perencanaan pembangunan desa menyepakati program dan kegiatan tersebut adalah musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga forum untuk merembungkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi, sehingga masyarakat lebih paham dengan konsep perencanaan pembangunan di desa.

Tabel 18
Tanggapan Responden Tentang Sering Melakukan Sosialisasi Program
Pembangunan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 8 | 16 % |
| b. Kadang-kadang | 15 | 30 % |
| c. Tidak Sama Sekali | 27 | 54 % |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan pemerintahan desa tidak sering melakukan sosialisasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebanyak 8 responden (16%) menyatakan Ya pemerintahan desa sering melakukan sosialisasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebanyak 15 responden (30%) menyatakan Kadang-kadang bahwa pemerintahan desa sering melakukan sosialisasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sebanyak 27 responden (54%) menyatakan pemerintahan desa tidak melakukan sosialisasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa tidak sering melakukan sosialisasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terbukti hanya sekitar 8 responden yang mengatakan Ya bahwa pemerintahan desa sering melakukan sosialisasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan 15 responden mengatakan kadang-kadang bahwa pemerintahan desa kadang-kadang melakukan sosialisasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan sekitar 27 Kepala Keluarga (54%) menyatakan pemerintahan desa tidak melakukan sosialisasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sikap yang diberikan pemerintah desa karena tidak melakukan sosialisasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat menyebabkan masyarakat menjadi kurang mengerti terhadap program pembangunan yang ada di desa. Dalam hal ini pemerintah desa belum bertanggung jawab dengan baik untuk memajukan desa dan seharusnya pemerintah desa haruslah tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan

masyarakat desa khususnya masyarakat kurang mampu (miskin), dan juga pemerintah desa tidak mengabaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa karena dari masyarakat desa itu sendiri perlu adanya pencapaian untuk mensejahterakan masyarakat.

Tabel 19
Tanggapan Responden Tentang Sering Dilakukan Pertemuan Antar Masyarakat Dalam Membahas Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 8 | 16 % |
| b. Kadang-kadang | 22 | 44 % |
| c. Tidak Sama Sekali | 20 | 40 % |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa 8 responden (16%) menyatakan Ya bahwa pemerintah desa melakukan pertemuan antar masyarakat dalam membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat, 22 responden (44%) menyatakan Kadang-kadang bahwa pemerintah desa kadang-kadang melakukan pertemuan antar masyarakat dalam membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan 20 responden (40%) menyatakan Tidak Sama Sekali bahwasannya pemerintah desa tidak pernah melakukan pertemuan antar masyarakat dalam membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa tidak sering melakukan pertemuan antar masyarakat dalam membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat desa sibuea terbukti hanya 8 responden (16%) yang mengatahan bahwa pemerintah desa melakukan pertemuan antar masyarakat dalam membahas

permasalahan yang dihadapi masyarakat, responden mengatakan bahwa pemerintah desa cukup aktif melakukan pertemuan antar masyarakat dalam membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sementara sekitar 22 responden (44%) mengatakan bahwa pemerintah desa hanya kadang-kadang saja melakukan pertemuan antar masyarakat dalam membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat, responden mengatakan bahwa pemerintah desa masih kurang peduli akan kesejahteraan masyarakatnya. Dan sekitar 20 responden (40%) masyarakat desa mengatakan bahwa pemerintah desa tidak melakukan pertemuan antar masyarakat dalam membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Padahal setiap orang atau masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, memiliki hak yang sama dalam memberikan atau menyampaikan masalah yang dihadapi, baik langsung maupun melalui perwakilan sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Tabel 20
Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Desa Telah Transparan
Dalam Menjalankan Proses Pembangunan Desa

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 12 | 24 % |
| b. Kadang-kadang | 11 | 22 % |
| c. Tidak Sama Sekali | 27 | 54 % |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa 12 responden (24%) menyatakan Ya pemerintah desa telah transparan dalam menjalankan proses pembangunan desa, 11 responden (22%) menyatakan kadang-kadang bahwa pemerintah desa telah

transparan dalam menjalankan proses pembangunan desa, dan 27 responden (54%) menyatakan tidak sama sekali bahwa pemerintah desa belum transparan dalam menjalankan proses pembangunan di desa sibuea.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa tidak bersikap transparan (terbuka) dalam menjalankan proses pembangunan desa, hal ini dibuktikan dengan hanya sekitar 12 responden (24%) yang mengatakan bahwa pemerintah desa telah transparan dalam menjalankan proses pembangunan desa, responden mengatakan bahwa pemerintah terbuka dalam hal pembangunan di desa, sementara ada 11 responden (22%) yang mengatakan bahwa pemerintah desa kadang-kadang transparan dalam menjalankan proses pembangunan desa, responden mengatakan hanya sebagian dari proses pembangunan yang dijelaskan kepada masyarakat, dan ada sebanyak 27 responden (54%) menyatakan pemerintah desa tidak transparan dalam menjalankan proses pembangunan desa. Seharusnya pemerintah desa selalu transparan dalam menjalankan proses pembangunan desa karena tujuan transparansi ini membangun rasa saling percaya antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, dimana pemerintah desa harus memberikan informasi akurat bagi masyarakat yang membutuhkannya. Terutama informasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di desa dan hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan di desa.

Tabel 21
Tanggapan Responden Tentang Interaksi Atau Hubungan Antara Masyarakat Dengan Institusi Lembaga Desa Berjalan Terus Manerus

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 13 | 26 % |
| b. Kadang-kadang | 7 | 14 % |

| | | |
|----------------------|----|-------|
| c. Tidak Sama Sekali | 30 | 60 % |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan interaksi atau hubungan antar masyarakat dengan institusi lembaga desa tidak berjalan terus menerus. Sebanyak 13 responden (60%) menyatakan Ya bahwa interaksi atau hubungan antar masyarakat dengan institusi lembaga desa berjalan terus menerus, sebanyak 7 responden (14%) menyatakan Kadang-kadang bahwa interaksi atau hubungan antar masyarakat dengan institusi lembaga desa berjalan terus menerus dan sebanyak 30 responden (26%) menyatakan tidak ada interaksi atau hubungan antar masyarakat dengan institusi lembaga desa berjalan terus menerus.

Jadi dapat disimpulkan bahwa interaksi atau hubungan antar masyarakat dengan institusi lembaga desa tidak berjalan terus menerus, hal ini dibuktikan dengan hanya 13 responden (26%) saja yang mengatakan bahwa interaksi atau hubungan antar masyarakat dengan institusi lembaga desa berjalan terus menerus, responden mengatakan bahwa pemerintah desa cukup aktif menjalankan tugasnya, sementara 7 responden (14%) mengatakan bahwa interaksi atau hubungan antar masyarakat dengan institusi lembaga desa hanya kadang-kadang saja berjalan, responden mengatakan pemerintah tidak begitu aktif dalam menjalankan tugasnya. Dan ada sebanyak 30 responden (60%) menyatakan interaksi atau hubungan antar masyarakat dengan institusi lembaga desa tidak berjalan terus menerus dengan baik, seharusnya mengingat bahwa lembaga adalah seperangkat alat pemerintah atau bahkan diartikan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi,

terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan. Dan seharusnya institusi lembaga desa memiliki hubungan yang teratur dengan memberikan hak, kewajiban, kepentingan, dan tanggungjawab bersama.

Tabel 22
Tanggapan Responden Tentang Lembaga Pemberdayaan Di Desa Berperan Aktif Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 5 | 10 % |
| b. Kadang-kadang | 23 | 46 % |
| c. Tidak Sama Sekali | 22 | 44 % |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan lembaga pemberdayaan di desa berperan aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat sebanyak 5 responden (10%) menyatakan Ya bahwa lembaga pemberdayaan di desa sudah berperan aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat, sebanyak 23 responden (46%) menyatakan Kadang-kadang lembaga pemberdayaan di desa berperan aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat dan sebanyak 22 responden (44%) menyatakan lembaga pemberdayaan di desa tidak berperan aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat

Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga pemberdayaan di desa tidak begitu berperan aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan hanya sekitar 5 responden (10%) saja yang mengatakan bahwa lembaga pemberdayaan di desa berperan aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat, responden mengatakan bahwa lembaga pemberdayaan di desa cukup baik dan mau mendengarkan aspirasi dari masyarakat. sementara sebanyak 23 Kepala

Keluarga (46%) menyatakan Kadang-kadang bahwa interaksi atau hubungan antar masyarakat dengan institusi lembaga desa hanya kadang-kadang saja berjalan dengan baik, responden mengatakan lembaga pemberdayaan di desa belum menjalankan tugasnya dengan baik dan aspirasi masyarakat kadang di dengar dan kadang tidak. Sementara 22 responden (44%) mengatakan bahwa lembaga pemberdayaan di desa tidak berperan aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat, responden mengatakan bahwa lembaga pemberdayaan di desa tidak pernah mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik. Melihat dari hasil terbanyak yang diperoleh sehingga dapat dilihat kurang tanggapnya pemerintah desa untuk melayani pihak yang berkepentingan. Seharusnya sikap menampung aspirasi masyarakat dengan baik merupakan salah satu syarat bagi setiap pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Tabel 26
Tanggapan Responden Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di
Desa Sibuea Mampu Menjalankan Tugasnya

| Pilihan Jawaban | N = 50 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| a. Ya | 2 | 4 % |
| b. Kadang-kadang | 37 | 74 % |
| c. Tidak Sama Sekali | 11 | 22 % |
| Jumlah | 50 | 100 % |

Pada tabel diatas menunjukkan sebanyak 2 responden (4%) menyatakan Ya bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat di desa sibuea sudah mampu menjalankan tugasnya, sebanyak 37 responden (74%) menyatakan Kadang-kadang lembaga pemberdayaan masyarakat di desa sibuea mampu menjalankan tugasnya dan masyarakat di desa sibuea. Dan 11 responden (22%) mengatakan

bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat di desa sibuea tidak mampu menjalankan tugasnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat di desa sibuea belum mampu menjalankan tugasnya terbukti hanya 2 responden (4%) saja yang mengatakan bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat di desa sibuea sudah mampu menjalankan tugasnya, responden mengatakan bahwa kinerja pemerintah desa sibuea sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Sementara sebanyak 37 responden (74%) memilih menyatakan bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat di desa sibuea kadang-kadang menjalankan tugasnya dengan baik, reponden mengatakan bahwa pemerintah desa belum maksimal dalam menjalankan tugasnya terbukti kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di desa sibuea masih tertinggal jika dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya.

Seharusnya meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat dan peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan pembangunan daerah, sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan pelaksanaan pembangunan desa

Tabel 27
Tabulasi Frekuensi Jawaban Angket Responden

| Item | Alternatif Jawaban | | | | | | N |
|-----------|--------------------|--------|----|--------|----|--------|--------|
| | A | | B | | C | | |
| | f | % | F | % | f | % | |
| 1 | 11 | 22 % | 37 | 74 % | 2 | 4 % | 50 |
| 2 | 11 | 22 % | 31 | 62 % | 8 | 16 % | 50 |
| 3 | 7 | 14 % | 28 | 56 % | 15 | 30 % | 50 |
| 4 | 8 | 16 % | 19 | 38 % | 23 | 46 % | 50 |
| 5 | 8 | 16 % | 32 | 64 % | 10 | 20 % | 50 |
| 6 | 12 | 24 % | 6 | 12 % | 32 | 64 % | 50 |
| 7 | 50 | 100 % | - | - | - | - | 50 |
| 8 | 6 | 12 % | 42 | 84 % | 2 | 4 % | 50 |
| 9 | 12 | 24 % | 17 | 34 % | 21 | 42 % | 50 |
| 10 | 50 | 100 % | - | - | - | - | 50 |
| 11 | 50 | 100 % | - | - | - | - | 50 |
| 12 | 12 | 24 % | 15 | 30 % | 23 | 46 % | 50 |
| 13 | 12 | 24 % | 16 | 32 % | 22 | 44 % | 50 |
| 14 | 12 | 24 % | 16 | 32 % | 22 | 44 % | 50 |
| 15 | 8 | 16 % | 15 | 30 % | 27 | 54 % | 50 |
| 16 | 8 | 16 % | 22 | 44 % | 20 | 40 % | 50 |
| 17 | 12 | 24 % | 11 | 22 % | 27 | 54 % | 50 |
| 18 | 13 | 26 % | 7 | 14 % | 30 | 60 % | 50 |
| 19 | 5 | 10 % | 23 | 46 % | 22 | 44 % | 50 |
| 20 | 2 | 4 % | 37 | 74 % | 11 | 22 % | 50 |
| Jumlah | | 618 % | | 748 % | | 634 % | 2000 % |
| Rata-rata | | 30.9 % | | 37.4 % | | 31.7 % | 100 % |

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah data-data yang terkumpul melalui penelitian dilapangan diolah dan dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi, maka hasil-hasil yang diperoleh sebagai temuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Sibuea mengatakan kadang-kadang mengetahui perencanaan pembangunan di desa sibuea. Responden menganggap pemerintah desa kurang

memberi informasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak selalu mengetahui perencanaan pembangunan di desa. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 4 yang menunjukkan bahwa sebanyak 37 responden (74%) menyatakan masyarakat desa kadang-kadang mengetahui perencanaan pembangunan di desa Sibuea.

2. Masyarakat desa Sibuea mengatakan kadang-kadang menghadiri rapat yang dibentuk oleh pemerintah desa dalam program perencanaan pembangunan di desa Sibuea. Masyarakat mengetahui bahwa menghadiri rapat sangat penting guna mengetahui apa-apa saja program yang di lakukan atau yang telah disusun oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan desa. Responden mengatakan bahwa dengan menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maka hal tersebut cukup sebagai bukti bahwa kepedulian masyarakat demi pembangunan. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 5 yang menunjukkan bahwa sebanyak 31 responden (62%) menyatakan masyarakat pernah menghadiri rapat yang dibentuk oleh pemerintah desa dalam program perencanaan pembangunan di desa Sibuea.

3. Masyarakat desa Sibuea mengatakan pemerintah desa kadang-kadang melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat. Komunikasi sangat penting dilakukan bukan hanya sekedar mengetahui perencanaan pembangunan di desa saja melainkan salah satu alat agar pemerintah desa dengan masyarakat lebih mempererat rasa persaudaraan, dengan adanya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memudahkan pemerintah dalam membangun desa yang lebih makmur dan sejahtera. Responden mengatakan bahwa pemerintah desa sudah

cukup memberikan komunikasi langsung dengan masyarakat. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 6 yang menunjukkan bahwa sebanyak 28 responden (56%) menyatakan pemerintah desa kadang-kadang melakukan komunikasi dengan masyarakat.

4. Masyarakat desa Sibuea mengatakan pemerintah desa tidak melihat kebutuhan masyarakat desa, seharusnya dengan mengetahui kebutuhan masyarakat di desa pemerintah tahu apa-apa saja yang di perlukan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin, karena dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan baik maka masyarakat pun bisa hidup dengan sejahtera. Dapat dilihat bahwa pemerintah desa tidak bekerja dengan baik. Responden mengatakan bahwa pemerintah desa tidak pernah melihat apa saja kebutuhan masyarakat di desa Sibuea. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 7 yang menunjukkan bahwa sebanyak 23 responden (46%) menyatakan pemerintah desa tidak melihat kebutuhan masyarakat.

5. Masyarakat desa Sibuea mengatakan kadang-kadang ada usaha yang dilakukan oleh kepala desa untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui perencanaan pembangunan desa. Dengan terjadinya hal ini, pemerintahan desa sudah cukup bekerja dalam memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mengetahui perencanaan pembangunan desa. Responden mengatakan bahwa pemerintah desa cukup memberikan peran yang baik dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 8 yang menunjukkan bahwa sebanyak 32 Kepala Keluarga (64%)

menyatakan kadang-kadang adanya usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pembangunan desa.

6. Masyarakat desa Sibuea mengatakan kepala desa tidak memperhatikan aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan. Dengan terjadinya hal ini, pemerintah desa tidak cukup baik dalam melaksanakan tugasnya yaitu memperhatikan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat. Responden mengatakan bahwa pemerintah desa tidak memperhatikan aspirasi atau tidak menerima pendapat yang di berikan masyarakat guna untuk pembangunan desa. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 9 yang menunjukkan bahwa sebanyak 32 responden (64%) menyatakan kepala desa tidak memperhatikan aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan.
7. Masyarakat desa Sibuea mengatakan masyarakat sudah sepenuhnya diberikan kebebasan untuk mengemukakan aspirasi atau pikiran mengenai pembangunan desa yang akan dilaksanakan. Responden mengatakan pemerintah desa memberi kesempatan bagi masyarakat desa Sibuea dalam menyalurkan aspirasi. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 10 yang menunjukkan bahwa sebanyak 50 responden (100%) menyatakan pemerintah desa memberi kebebasan pada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
8. Masyarakat desa Sibuea mengatakan kadang-kadang pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Responden mengatakan masyarakat merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Misalnya misalnya dengan mengadakan gotong royong untuk membersihkan desa. Hal ini dibuktikan

berdasarkan persentase pada tabel 11 yang menunjukkan bahwa sebanyak 42 responden (84%) menyatakan pemerintah desa kadang-kadang melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

9. Masyarakat Sibuea mengatakan pemerintah desa selama ini tidak memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakat. Responden mengaku bahwa pemerintah desa tidak memperhatikan produksi yang dihasilkan oleh masyarakat, apakah dari hasil produksi yang dilakukan oleh masyarakat berjalan dengan baik atau tidak, dan masyarakat juga seharusnya dapat memperoleh bibit-bibit yang ingin di tanam dengan harga lebih murah di koperasi desa. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 12 yang menunjukkan bahwa sebanyak 21 responden (42%) menyatakan pemerintah desa tidak memanfaatkan sumber daya pembangunan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakat. .
10. Masyarakat desa Sibuea mengatakan masyarakat merasa bahwa perencanaan pembangunan di desa merupakan tanggung jawab masyarakat juga. Responden mengatakan bahwa rasa tanggung jawab dalam membangun desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa saja melainkan tanggung jawab bersama. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 13 yang menunjukkan bahwa sebanyak 50 responden (100%) menyatakan masyarakat merasa bahwa perencanaan pembangunan di desa Sibuea merupakan tanggung jawab bersama, demi mewujudkan pembangunan yang sejahtera.

11. Masyarakat di Desa Sibuea mengatakan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat di perlukan sebanyak 50 responden (100%). Masyarakat di desa Sibuea kecamatan Laguboti sudah sepenuhnya merasa bahwa keterlibatan masyarakat memang harus demi mewujudkan cita-cita bersama, mengingat masyarakat berperan penting dalam pembangunan di desa karena tanpa adanya keterlibatan masyarakat maka desa tersebut akan sulit berkembang dan jauh tertinggal dari desa-desa yang lainnya.
12. Masyarakat Sibuea menyatakan tidak mengetahui apa-apa saja program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Responden mengaku bahwa pemerintah desa tidak menyampaikan apa saja program-program yang akan di laksanakan di desa sehingga masyarakat tidak mengetahui kinerja pemerintah desa. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 15 yang menunjukkan bahwa sebanyak 23 responden (46%) menyatakan masyarakat tidak mengetahui program pembangunan yang di lakukan di desa.
13. Masyarakat Sibuea menyatakan telah tidak memahami proses penyusunan perencanaan pembangunan desa, masyarakat mungkin mengetahui apa saja program yang akan dilaksanakan di desa tetapi banyak masyarakat yang mengaku tidak memahami apa isi dari program-program pembangunan tersebut. Responden mengaku bahwa kurangnya kemampuan dalam memahami proses perencanaan pembangunan desa di karenakan banyak juga masyarakat di desa sibuea yang buta huruf dan memiliki pendidikan yang rendah. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 16 yang menunjukkan bahwa sebanyak 22 responden (44%)

menyatakan masyarakat masih tidak memahami proses penyusunan perencanaan pembangunan di desa.

14. Masyarakat Sibuea menyatakan tidak paham dengan konsep perencanaan pembangunan desa, masyarakat masih banyak yang tidak mengerti dengan apa saja rencana-rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah, seharusnya pemerintah desa dapat menjelaskan konsep perencanaan pembangunan dengan cara yang dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Responden mengaku bahwa kurangnya kemampuan dalam memahami konsep perencanaan pembangunan desa di karenakan banyak juga masyarakat di desa sibuea yang buta huruf dan memiliki pendidikan yang rendah, dal hal ini yang dapat memacu masyarakat menjadi malas untuk mengetahui apa saja yang di konsep oleh pemerintah desa demi pembangunan di desa Sibuea. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 17 yang menunjukkan bahwa sebanyak 22 responden (44%) menyatakan masyarakat masih tidak mengerti/tidak paham dengan konsep perencanaan pembangunan desa.

15. Masyarakat Sibuea menyatakan pemerintah desa tidak melakukan sosialisasi program-program pembangunan desa sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Responden mengaku bahwa kurang aktifnya pemerintahan desa dalam mensosialisasikan program-program pembangunan desa guna mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 18 yang menunjukkan bahwa sebanyak 27 responden (54%) menyatakan pemerintah desa tidak melakukan sosialisasi lebih dahulu mengenai program-program

pembangunan desa selama ini sehingga tidak sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat.

16. Masyarakat desa Sibuea mengatakan kadang-kadang melakukan pertemuan antar masyarakat dalam rangka membahas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Dengan melakukan pertemuan antar masyarakat setidaknya masih ada masyarakat yang peduli membangun desa. Karena pembangunan yang melibatkan semua pihak dapat memberikan hasil yang maksimal. Banyak keuntungan yang dapat dipetik dari melakukan pertemuan antar masyarakat, perubahan sikap masyarakat yang sebelumnya acuh tak acuh terhadap proses pembangunan menjadi peduli terhadap pembangunan di sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta kesediaan warga masyarakat menyisihkan tenaga dan materi/ uang untuk swadaya pembangunan. Responden menyatakan bahwa di desa pernah melakukan pertemuan antar masyarakat dalam rangka membahas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 19 yang menunjukkan bahwa sebanyak 22 responden (44%) menyatakan Kadang-kadang melakukan pertemuan antar masyarakat dalam rangka membahas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

17. Masyarakat desa Sibuea mengatakan pemerintah desa selama ini tidak transparan dalam menjalankan proses pembangunan desa. Responden mengatakan bahwa pemerintah desa selama ini tidak transparan dalam menjalankan proses pembangunan desa terutama dalam dana pembangunan desa. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 20 yang menunjukkan bahwa sebanyak 27

responden (54%) menyatakan pemerintah sama sekali tidak transparan dalam pembangunan desa. Tujuan transparansi ini membangun rasa saling percaya antar pemerintah desa dengan masyarakat di desa, dimana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi masyarakat yang membutuhkannya, terutama informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah peraturan desa, pembangunan desa dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan desa.

Seharusnya pemerintah desa bersikap transparansi agar dapat menjadi suatu alat untuk masyarakat mengetahui seberapa jelas kepala desa memberikan informasi mengenai pembangunan desa.

18. Masyarakat desa Sibuea mengatakan interaksi atau hubungan antar masyarakat dengan institusi atau lembaga desa tidak berjalan terus menerus terutama dalam masalah penyusunan perencanaan pembangunan, masih banyak masyarakat yang bertanya sebenarnya apa dan bagaimana perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di desa tersebut. Dengan terjadinya hal ini, pemerintah desa belum cukup baik dalam melaksanakan tugasnya yaitu tetap merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat yang ingin mengetahui pembangunan yang terjadi di desa. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 21 yang menunjukkan bahwa sebanyak 30 responden (60%) menyatakan interaksi atau hubungan antara masyarakat dengan institusi atau lembaga desa tidak berjalan dengan baik.

19. Masyarakat desa Sibuea menyatakan lembaga pemberdayaan di desa belum sepenuhnya berperan aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat terutama dalam merumuskan program-program pembangunan desa. Dengan terjadinya hal ini,

pemerintah desa masih kurang baik dalam melaksanakan tugasnya karena belum sepenuhnya menjaring aspirasi masyarakat, kadang di dengar dan kadang tidak. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 22 yang menunjukkan bahwa sebanyak 23 responden (46%) menyatakan lembaga pemberdayaan masyarakat kadang-kadang berperan aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat.

20. Masyarakat desa Sibuea menyatakan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa belum mampu menjalankan tugasnya secara maksimal. Dengan terjadinya hal ini, lembaga pemberdayaan masyarakat harus lebih aktif dan lebih giat lagi dalam bekerja terutama harus selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mendengarkan dengan baik aspirasi masyarakat di desa. Hal ini dibuktikan berdasarkan persentase pada tabel 23 yang menunjukkan bahwa sebanyak 37 responden (74%) menyatakan lembaga pemberdayaan masyarakat kadang-kadang berperan aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat.